

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Kohar, **Notaris Berkomunikasi**, Alumni, Bandung, 1984.
- Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2004.
- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, **Pokok-Pokok Hukum Bisnis**, Salemba Empat, Jakarta, 1980.
- Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Boedi Harsono, **Hukum Agraria Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Johannes Ibrahim, **Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum**, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, **Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Muhamad Sadi Is, **Hukum Perusahaan di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2016.
- Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Jakarta, 2009.
- Mustofa dan Suratman, **Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Nurdin Usman, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- R. Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Binacipta, Bandung, 1977.
- Sahnan, **Hukum Agraria Indonesia**, Setara Press, Malang, 2016.
- Samun Ismaya, **Pengantar Hukum Agraria**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Sentosa Sembiring, **Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas**, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Soerjatin, **Hukum Dagang I dan II**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2012.
- Subekti, **Hukum Pembuktian**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010.

Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata di Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Sunarto, **Pajak dan Retribusi Daerah**, Amus dan Citra Pustaka, Yogyakarta, 2005.

Susanti Ante, **Penerapan Asas Pemisahan Horizontal Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kota Manado**, Lex et Societatis, Volume 3 Nomor 6, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2015.

Urip Santoso, **Hukum Agraria Kajian Komprehensif**, Kencana, Jakarta, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276.

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo. Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 57.

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 1.

Skripsi

Achmad Ridwan, **Perlakuan Akuntansi Aset Biologis PT. Perkebunan Nusantara XIV Makassar (Persero)**, Skripsi tidak diterbitkan, Makassar, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, 2011.

Nur Salim, **Analisis Pengaruh Pertumbuhan Aset, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Risiko Bisnis Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman**, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2015.

Nuzula Hidayah Briliannisa, **Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung (Studi Kasus Pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) Di Kelurahan Gajahmungkur)**, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016.

Tesis

Sonia Margaretha Saragih, **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Berdasarkan Asas Pemisahan Horizontal)**, Tesis, Yogyakarta, Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

Jurnal

Artus, **Efektivitas Penerapan Pasal 55 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Dalam Kaitannya Dengan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Ecaran Illegal Dikota Pontianak**, E-Jurnal Gloria Yuris, Volume 2 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2014.

Mareci Susi Afrisca Sembiring. **Efektivitas *Advis Planning* Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Pematangsiantar**, Jurnal Ilmu Hukum dan Negara, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.

Rachmatica Pramuna dan Surya Raharja. **Dampak Penggunaan Sumber Daya Manusia Terhadap Reputasi Perusahaan**, Diponegoro Journal of

Accounting, Volume 2 Nomor 3, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.

Internet

Cita Astungkoro Sukmawirawan, Emi Zulaika, I Wayan Yasa, **Kekuatan Pembuktian Legalisasi Dan Waarmerrking Akta Dibawah Tangan Oleh Notaris**, 2014, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa (online), <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58960/Cita%20Astungkoro.pdf?sequence=1>, diakses 4 Oktober 2017.

<http://ditjenpdt.kemendes.go.id/potensi/district/14-kabupaten-situbondo>, diakses 22 November 2017 pukul 16.00 WIB

<https://situbondokab.go.id/sejarah-situbondo/>, diakses 22 November 2017 pukul 16.30 WIB

Lain-Lain

Hasil wawancara Survey dengan narasumber, Taufan A. Jaksana Kepala Bidang Pelayanan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo

Hasil wawancara Survey dengan narasumber, Tanto Kasubi Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

Hasil wawancara Survey dengan narasumber, Sapto Budi Santoso Kasubi Penatagunaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

Hasil wawancara Survey dengan narasumber, Kusnul *accounting manager* pada PT. Panca Mitra Multiperdana Situbondo dan PT. Tri Mitra Makmur Situbondo

Hasil wawancara Survey dengan narasumber, Eko *PGA Manager* sekaligus Legal pada PT. Panca Mitra Multiperdana Situbondo dan PT. Tri Mitra Makmur Situbondo

Hasil wawancara Survey dengan narasumber, Nur Amaliah Ranie Notaris dan PPAT pada Kantor Notaris Nur Amaliah Ranie SH., M.Kn Kabupaten Situbondo